

EFEKTIVITAS PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA DI DESA MASALOKA SELATAN KECAMATAN KEPULAUAN MASALOKA RAYA KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Restin Huwayda
NPP 30.1368

*Asdaf Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara
Program Studi Keuangan Publik*

Email: restinhuwayda10@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Ika Agustina, SE,M.Si

ABSTRACT

Problem Statetment/Background (GAP): Writing in this research activity aims to see and describe "The Effectiveness of Village Financial Administration in Masaloka Selatan Village, Pulau Masaloka Raya District, Bombana Regency, Southeast Sulawesi Province." to those who understand more about IT (Information and Technology); weakness of village officials who do not understand the main tasks and functions in carrying out village government duties, especially section heads; as well as the demand for transparent and accountable village financial management by using Siskeudes to burden village officials because they have to use Siskeudes with limited network provider conditions. **Purpose:** this study was to determine the effectiveness of village financial administration in Masaloka Selatan Village, the obstacles faced by Masaloka Selatan Village officials in managing village finances and to find out the efforts made to solve the problem. **Method:** used is a qualitative descriptive method with an inductive approach so that the writer describes the actual situation at the research location. Data collection techniques are carried out by means of observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques using data reduction, data presentation and drawing conclusions. **Conclusion:** that village financial administration in Masaloka Selatan village has been carried out quite effectively where of the five dimensions that determine effectiveness in village financial administration activities there is one dimension and indicator that has not been achieved. The indicator is in the form of efficiency in implementing village financial administration in Masaloka Selatan Village. **Keywords :** Effectiveness, Administration, Village Finance.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Dalam penelitian ini yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah adanya ketergantungan dalam pengoperasian pengelolaan keuangan berbasis sistem informasi karena keterbatasan perangkat pemerintah desa kepada pihak yang lebih mengerti IT (*Information and Tecnology*); kelemahan perangkat desa yang kurang memahami tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan tugas pemerintahan desa khususnya kepala seksi; serta adanya tuntutan pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel dengan menggunakan

Siskeudes membebani perangkat desa karena harus menggunakan Siskeudes dengan kondisi provider jaringan yang terbatas. **Tujuan:** tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penatausahaan keuangan desa di Desa Masaloka Selatan, kendala yang dihadapi oleh perangkat Desa Masaloka Selatan dalam penatausahaan keuangan desa serta mengetahui upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. **Metode:** metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif sehingga penulis menggambarkan keadaan sebenarnya di lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa penatausahaan keuangan desa di desa Masaloka Selatan telah dilakukan cukup efektif dimana dari 5 (lima) dimensi yang menentukan ukuran keefektifan dalam kegiatan penatausahaan keuangan desa terdapat satu dimensi dan indikator yang belum tercapai. Indikator tersebut berupa efisiensi pelaksanaan penatausahaan keuangan desa di Desa Masaloka Selatan.

Kata kunci: Efektivitas, Penatausahaan, Keuangan Desa.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan setiap daerah dilakukan dengan penyesuaian prioritas pembangunan nasional sehingga setiap pembangunan yang dilaksanakan dapat bersinergi dan terintegritas. Begitu pula dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan di daerah. Sinergitas pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dengan penggunaan sistem informasi teknologi untuk menunjang pelaksanaan pembangunan pada masing-masing daerah. Penggunaan sistem informasi ini telah diupayakan dan direalisasikan di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, beragam aplikasi pengelolaan keuangan telah diupayakan oleh pemerintah daerah guna mendukung kesejahteraan masyarakatnya dengan jumlah penduduk mencapai 51.743 jiwa (sid kemendes, 2022).

Pemerintah tidak hanya berfokus pada pengelolaan keuangan ditingkat kabupaten/kota namun juga memberikan perhatian lebih pada pengelolaan keuangan desa. Desa menjadi fokus pembangunan pemerintah karena negara Indonesia akan maju apabila dari sektor desa sudah maju. Pelaksanaan program kegiatan di desa dilaksanakan dengan penggunaan dana yang sumber pendapatan desa dan telah diatur dalam peraturan-perundangan yang berlaku. “Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa” (Soemantri, 2011:133). Sedangkan perangkat desa yang bertugas melakukan tugas penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah kepala urusan keuangan selaku bendahara yang bertugas mencatat seluruh transaksi yang terjadi kedalam Buku Kas Umum (BKU). Diperlukan buku pembantu dalam pelaksanaannya untuk mendampingi BKU tersebut, sehingga bendahara juga membuat buku pembantu yang memudahkan bendahara tersebut untuk pembagian pencatatan keuangan. Buku pembantu tersebut ada tiga jenis yaitu buku pembantu bank, panjar dan pajak. Pengelolaan keuangan desa khususnya tahap penatausahaan seluruh perangkat desa memiliki peran yang sangat penting. Perangkat desa yang berwenang dituntut memiliki pengetahuan yang cukup tidak hanya dalam bidang keuangan tetapi juga dibidang teknologi informasi untuk menjamin output penatausahaan keuangan desa yang baik.

Salah satu sumber penerimaan APBDes yaitu dana desa dimana fokus penggunaannya ditentukan oleh pusat setiap tahunnya. Berikut informasi Dana Desa Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya pada tahun 2021:

Tabel 1. 1
Anggaran Dana Desa Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya Tahun 2021

No	Desa	Pagu	Dana Desa RKPDes Tahap I	Dana Desa RKPDes Tahap II	Dana Desa RKPDes Tahap III
1.	Masaloka	Rp.689,981,000	Rp.275,992,400	Rp.275,992,400	Rp.137,996,200
2.	Batu Lamburi	Rp.782,291,000	Rp.312,916,400	Rp.312,916,400	Rp.156,458,200
3.	Masaloka Selatan	Rp.755,003,000	Rp.302,001,200	Rp.302,001,200	Rp.151.000.600
4.	Masaloka Timur	Rp.1,110,896,000	Rp.444,358,400	Rp.444,358,400	Rp.222,179,200
5.	Masaloka Barat	Rp.1,093,315,000	Rp.437,326,000	Rp.437,326,000	Rp.218,663,000

Sumber : <http://sid.kemendesa.go.id>, 2021

Berdasarkan tabel di atas diketahui jumlah anggaran dana desa tiap tahapnya di Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya. Desa Masaloka Selatan mendapatkan dana desa sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan dengan tiga kali tahap penyaluran yaitu pada tahap I memperoleh sebesar Rp.302,001,200, tahap II memperoleh sebesar Rp.302,001,200 dan tahap III sebesar Rp.151.000.600. Total perolehannya sesuai dengan pagu yakni sebesar Rp.755,003,000.

Melalui dana desa dan sumber pemasukan lain, maka Desa Masaloka Selatan Kepulauan Masaloka Raya Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara telah dilakukan program pembangunan. Program pembangunan tersebut ditunjukkan dengan masuknya aliran listrik dan air melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang pada tahun-tahun sebelumnya belum dapat dijangkau pada Desa Masaloka Selatan. Kemudian berdasarkan berita yang diliput 30 Agustus 2021 oleh Media *Online Terkinnesia.Com* diketahui Pemerintah Desa Masaloka Selatan telah melakukan pembangunan infrastruktur jalan desa berupa pembangunan rabat beton, hal ini menggambarkan bahwa pembangunan infrastruktur memang telah dijalankan. Dibalik pembangunan tersebut, kenyataannya masih banyak permasalahan yang dihadapi di desa, seperti kemampuan sumber daya perangkat di Desa Masaloka Selatan yang terbatas. Hal ini membuat pemerintah daerah juga sulit untuk memberdayakan para perangkat desa tersebut. Oleh karenanya pemerintah provinsi/kabupaten terus berupaya untuk memberikan pelatihan kepada perangkat desa.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Permasalahan umum yang dirasakan Desa Masaloka Selatan yaitu banyaknya pembangunan yang terhambat akibat perencanaan yang kurang matang dan keterbatasan pemahaman perangkat desa. Sulitnya mengakses internet karena *provider* jaringan yang sangat

lemah bahkan tidak terdapat jaringan sama sekali untuk beberapa titik-titik tertentu. Anak-anak di desa cenderung memiliki minat belajar dan sekolah yang rendah akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia di desa tersebut.

Banyaknya permasalahan yang dirasakan Desa Masaloka Selatan tersebut mempengaruhi pelaksanaan aktivitas pemerintahan khususnya pada pengelolaan keuangan desa yang mengandalkan prinsip partisipatif, akuntabilitas, transparatif, serta disiplin anggaran. Beberapa tahap pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan setiap tahunnya pada masing-masing pemerintah desa tidak jauh berbeda dengan pengelolaan keuangan daerah yaitu melalui tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Wasistiono dan Tahir (2006:73) mengatakan dalam bukunya “ketidakberdayaan desa dalam segala aspek disebabkan oleh berbagai masalah mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan”. Masalah mendasar tersebut menjadikan desa memiliki banyak keterbatasan dan kendala. Berikut kendala yang ada di Desa Masaloka Selatan yang penulis ketahui melalui observasi penelitian lapangan pada tanggal 16 januari 2023:

- a. Adanya ketergantungan dalam pengoperasian pengelolaan keuangan berbasis sistem informasi karena keterbatasan perangkat pemerintah desa kepada pihak yang lebih mengerti IT (*Information and Tecnology*).
- b. Kelemahan perangkat desa yang kurang memahami tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan tugas pemerintahan desa khususnya kepala seksi.
- c. Adanya tuntutan pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel dengan menggunakan Siskeudes dengan kondisi kualitas jaringan yang terbatas.

Lebih lanjut berdasarkan hasil observasi lapangan diketahui bahwa masalah dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Masaloka Selatan adalah kurangnya penyerapan anggaran dana desa, yaitu menjelang akhir tahun hanya terserap kurang lebih 700 juta rupiah dengan total dana desa kurang lebih sebesar 900 juta rupiah. Hal ini tentu menjadi masalah dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Masaloka Selatan dan hal ini yang menjadi penyebab pengurangan dana desa yang diterima oleh Desa Masaloka Selatan tahun anggaran 2023 yang berjumlah kurang lebih sekitar 700 juta. Sebagian besar kendala di atas berhubungan dengan pengelolaan keuangan dimana pengelolaan keuangan yang terkendala pada sumber daya manusia yang lemah yang berakibat pada penggunaan sistem informasi atau Siskeudes yang masih sulit untuk dioperasikan oleh perangkat desa. Selain kendala tersebut Desa Masaloka Selatan juga masih dihadapkan pada permasalahan seperti alur pencairan keuangan yang masih belum dipahami oleh perangkat pemerintah desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa desa memerlukan dukungan untuk pembangunan desa baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar kendala tersebut dapat diselesaikan.

Berdasarkan masalah umum dan masalah khusus yang telah disebutkan di atas, maka diketahui pada penatausahaan keuangan desa masih terkendala pada kualitas perangkat desa yang masih belum memahami tugas pokok dan fungsinya khususnya kepala urusan dan kepala seksi sehingga membebani kerja perangkat desa untuk menjalankan keseluruhan tugas-tugas pemerintahan, kemudian adanya kendala jaringan akibat provider jaringan yang lemah sehingga semakin membenani sekretaris desa dalam melakukan kegiatan penatausahaan keuangan desa dan di tuntut untuk stranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam Siskeudes, hal ini menyebabkan adanya ketergantungan dalam penggunaan Siskeudes dalam seluruh pegelolaan keuangan dasa terkhusus pada proses penatausahaan keuangan desa. Sehingga untuk mengoperasionalkan sistem penatausahaan melalui Siskeudes mengandalkan seseorang operator di salah satu daerah ibukota

kabupaten (Kasiputih) yang khusus digaji untuk pengoperasian teknologi informasi agar pelaksanaan penatausahaan keuangan desa sehingga kegiatan penatausahaan keuangan desa melalui Siskeudes dapat berjalan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian sebelumnya, hal ini dimaksudkan agar dapat menunjang pelaksanaan penelitian penulis sehingga penulis memiliki bahan pembandingan dengan penelitian terdahulu dengan kajian yang tidak jauh berbeda dengan persoalan yang penulis angkat. Penelitian Nailatur Ilmi Nafi'ah (2019) dengan judul Efektivitas Penerapan Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Meningkatkan Kualitas Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Desa di Desa Kalirejo Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur, memperoleh hasil penelitian Penerapan Siskeudes pada proses penatausahaan pengeluaran keuangan desa sudah terlaksana namun belum mencapai target secara maksimal sehingga dikategorikan belum efektif dikarenakan masih adanya kendala yang timbul dari penerapan Siskeudes ini (Nafi'ah, 2019). Penelitian Geri Rivaldi (2018) berjudul Efektivitas Penatausahaan Keuangan Desa Di Desa Tenjolaut Kecamatan Cokalongwetan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, hasil penelitiannya adalah Penatausahaan keuangan desa di Desa Tenjolaut belum efektif karena fasilitas yang kurang mendukung, masyarakat kurang peduli terhadap pemerintah desa, gaya kepemimpinan kepala desa yang kurang tegas dalam menyelesaikan masalah, kurang transparansi keuangan desa karena masih menggunakan cara-cara lama (Rivaldi, 2018). Penelitian Desi Aramana (2022) berjudul Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, hasilnya Penatausahaan Desa Perapat Hilir 2018 mulai menggunakan Siskeudes dan tahun 2019 telah sepenuhnya menggunakannya Melalui sumber daya manusia yang sudah terlatih karena telah mengikuti pelatihan yang disediakan oleh pemerintah sehingga Sistem penatausahaan yang dilaksanakan dapat dikatakan baik dan sesuai dengan standar (Amarana D.,2022). Penelitian Irma Mulyadi (2019) dengan judul Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintahan Desa di Kota Sawahlunto), hasil penelitiannya ditemukan fakta bahwa Efektivitas serapan anggaran Dana Desa yang diperoleh dari hasil penelitian di seluruh desa tahun anggaran 2017 menunjukkan pencapaian yang tinggi. Realisasi anggaran terhadap target belanja mencapai 100%. Faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan desa yaitu kualitas perangkat desa yang rendah dan kemampuan pemanfaatan teknologi yang masih kurang dan sebagainya (Mulyadi, 2019). Penelitian Teta Midra, Asdi Agustar, dan Ira Wahyuni Syafri (2021) berjudul Tata Kelola Nagari dan Implikasinya terhadap Pembangunan Nagari di Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok, hasilnya bahwa Tata kelola keuangan nagari sudah cukup baik, dilihat dari bagaimana komposisi (baik dalam penerimaan maupun belanja nagari). Permasalahan dari tahapan pengelolaan keuangan dapat diatasi oleh nagari dari waktu ke waktu dengan meningkatkan kompetensi dan kapabilitas perangkat desa (Midra T. Dkk, 2021)

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini tentu memiliki perbedaan terhadap penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya dan penulis jadikan sebagai acuan dalam penyusunan hasil penelitian yang dilakukan

oleh penulis. Konteks penelitian yang penulis lakukan berfokus pada tingkat efektivitas kegiatan penelitian yang dilakukan di Desa Masaloka Selatan Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya sedangkan penelitian terdahulu yang penulis jadikan acuan memiliki ruang lingkup penelitian yang lebih luas seperti pada penelitian Nailatul Imi Nafi'ah (2019) perbedaan penelitiannya terdapat pada lokus yang penulis angkat juga pada penelitian ini menganalisis penerapan keuangan desa secara umum pada aplikasi siskeudes sedangkan penelitian yang akan penulis kaji hanya akan menganalisis proses penatausahaan keuangan desa yang pada dasarnya relevan pada penelitian ini begitu pula pada penelitian terdahulu yang lain. Penelitian Geri Rivaldi (2018) Perbedaan penelitian terdapat pada lokus kajian yang berbeda sehingga penulis dapat membandingkan kondisi realita pengelolaan keuangan terkhusus pada proses penatausahaan yang dikaji dalam penelitian Geri Rivaldi dengan yang ada pada desa Masaloka Selatan serta membandingkan kendala-kendala sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang baru. Penelitian Desi Aramana (2022) perbedaan penelitian yaitu lokus yang menjadi tempat kajian menggunakan lokus yang berbeda, kemudian penelitian ini menggunakan ukuran akuntabilitas untuk menilai pengelolaan keuangan desa khususnya pengelolaan dana desa sedangkan penulis menggunakan ukuran efektivitas dalam menilai penatausahaan keuangan desa. Penelitian Irma Mulyadi (2019) perbedaan terletak pada lokus yang menjadi tempat kajian kemudian objek penelitian yang berbeda karena penelitian ini lebih berfokus pada pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan dan mengkaji realisasi anggaran terhadap target belanja desa sedangkan penelitian yang penulis akan lakukan lebih berfokus pada kegiatan penatausahaan keuangan desa dengan menggunakan siskeudes. Penelitian Teta Midra, Asdi Agustar, dan Ira Wahyuni Syafri (2021) perbedaan terletak pada lokus penelitian dimana penelitian ini dilakukan di salah satu nagari di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. Kemudian fokus penelitian ini terletak pada tata kelola keuangan nagari secara umum sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada kegiatan penatausahaan keuangan desa.

1.5. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penatausahaan keuangan desa dan mengetahui kualitas pelaporan keuangan desa melalui penatausahaan keuangan desa tersebut di Desa Masaloka Selatan Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan suatu metode penelitian untuk menjawab permasalahan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Mengkaji penelitian secara kualitatif. Sugiyono (2020:18) "metode kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci serta penelitian dilakukan untuk lebih menekankan makna dari pada generalisasi".

Sumber data penelitian ini diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu *person, place, and paper* (Arikonto, 2010) dimana Informasi *person* berupa informan yang penulis wawancarai dalam kegiatan penelitian yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa serta operator Desa Masaloka Selatan. Informasi *place* dalam penelitian ini menyajikan sumber data yang berasal dari

Kantor Desa Masaloka Selatan sebagai lokus penelitian. Sedangkan informasi *paper* yang berhubungan dengan kegiatan penatausahaan keuangan desa di desa Masaloka Selatan adalah SPJ APBDes tahun 2022, data aset desa Masaloka Selatan tahun 2016-2022, dan informasi kepegawaian perangkat desa Masaloka Selatan tahun 2022.

Penelitian ini menggunakan teknik *sampling purposive* dalam teknik pengambilan sampel. Sugiyono (2020:133) “teknik *sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian untuk menganalisis hasil yang diperoleh penulis menggunakan metode teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data. Serta verifikasi dan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis mengkaji efektivitas penatausahaan keuangan desa di Desa Masaloka Selatan Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara menggunakan teori efektivitas yang relevan dengan kajian yang dilakukan oleh penulis yaitu teori efektivitas menurut Edy Sutrisno (2007) dimana terdapat 5 (lima) indikator yaitu: Pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, perubahan nyata.

3.1. Pemahaman Program

a. Penguasaan alur penatausahaan keuangan desa di Desa Masaloka Selatan Melalui wawancara bersama Ibu Kepala Desa yaitu Ibu Masfiah pada tanggal 11 Januari 2023 terkait penguasaan alur/tahapan penatausahaan dalam Siskeudes, beliau mengatakan bahwa:

“perangkat desa sudah mampu memahami dan menguasai tugas dan fungsinya masing-masing termasuk alur penatausahaan dan penggunaan *website* Siskeudes untuk setiap pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan Desa Masaloka Selatan melalui Siskeudes. Adanya pelatihan dan workshop evaluasi pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten yang diikuti oleh para perangkat desa baik kepala desa atau yang mewakili sehingga penguasaan perangkat desa dalam memahami tugas dan fungsinya dalam menjalankan tugas. Terlebih Kabupaten Bombana sangat cepat tanggap terhadap peluncuran *website* Siskeudes ini sejak tahun 2015 melakukan pelatihan penggunaan *website* Siskeudes”

Tabel 3.1
Peserta Pelatihan Perangkat Desa Di Ibukota Kabupaten Bombana

No	Peserta	Jenis Kegiatan Pelatihan	Tahun
1.	Masfiah	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa menggunakan Siskeudes	2019
2.	Musrin	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa menggunakan Siskeudes	2019
3.	Damrin	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa menggunakan Siskeudes	2019
4.	Masfiah	Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembangunan Desa	2022
5.	Musrin	Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembangunan Desa	2022
6.	Muh Fajri, S.IP	Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembangunan Desa	2022

Sumber : Diolah oleh Penulis, 2023

Wawancara juga dilakukan kepada Sekretaris, dan bendahara serta operator desa. Hasil wawancaranya menunjukkan jawaban yang sama. maka penulis mengambil kesimpulan bahwa perangkat desa yang bertugas melakukan kegiatan penatausahaan mampu dan mengetahui masing-masing tugas dan fungsinya termasuk alur pelaksanaan kegiatan penatausahaan mulai dari menginput penerimaan

desa baik tunai, penerimaan bank maupun penyetoran termasuk seluruh alur penatausahaan keuangan desa melalui *website* Siskeudes.

b. Penguasaan perangkat desa dalam mengoperasikan *website* Siskeudes

Penguasaan perangkat desa dalam mengoperasikan *website* Siskeudes merupakan indikator yang penting untuk mengetahui *skill* operator desa. Berdasarkan hasil wawancara kepala desa Ibu Masfiah terikait kompetensi operator dalam mengoperasikan *website* Siskeudes pada tanggal 11 Januari 2023, Ibu Masfiah mengatakan bahwa:

“Operator Desa Masaloka Selatan adalah Pak Damrin yang mengoperasikan Siskeudes dari Kasiputih sehingga menunjang jalannya pengelolaan keuangan di Desa Masaloka Selatan. Akibat jaringan internet yang menghambat, maka untuk memudahkan pelaksanaan penatausahaan menggunakan *website* Siskeudes maka operator *website* Siskeudes melakukan kegiatan penatausahaan keuangan desa di Kasiputih, kebetulan Pak Damrin tinggal di sana jadi beliau bisa mengerjakan kegiatan penatausahaan dengan fleksibel.”

Kemampuan atas penguasaan pengoperasionalan *website* Siskeudes dalam kegiatan penatausahaan dapat tercermin dari pelaporan keuangan desa yang baik. Berikut penulis tampilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam laporan keuangan desa di Desa Masaloka Selatan sebagai refleksi dari kualitas laporan keuangan yang baik.

Tabel 3.2
Laporan Realisasi Anggaran Desa Masaloka Selatan Tahun Anggaran 2022

KODE REK	URAIN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KUR ANG) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.255.003.000,00	1.255.003.000,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	755.003.000,00	755.003.000,00	0,00
4.2.3.	Lokasi Dana Desa	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-Lain	4.606.000,00	4.606.000,00	0,00
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun Tahun Sebelumnya	4.606.000,00	4.606.000,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN			0,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	349.846.347,00	346.730.160,00	3.116.187,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	221.400.000,00	221.400.000,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.506.147,00	1.389.960,00	3.116.187,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00
5.1.5.	Jaminan Sosial Anggota BPD	340.200,00	340.200,00	0,00
5.2.	Belanja Barang Dan Jasa	504.245.653,00	504.245.653,00	53,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	105.604.653,00	105.604.653,00	53,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	116.400.000,00	116.400.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalan Dinas	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa Yang Diserahkan Kepada	252.186.000,00	252.186.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	356.517.000,00	356.517.000,00	0,00

5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan, Peralatan, Mesin dan	22.100.000,00	22.100.000,00	0,00
5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan	12.0590.000,00	12.0590.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	61.271.000,00	61.271.000,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	237.137.000,00	237.137.000,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	23.950.000,00	23.950.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.264.609.000,00	1.261.492.760,00	3.116.240,00
	SURPLUS/DEFISIT	0,00	3.116.240,00	(3.116.240,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	3.116.240,00	(3.116.240,00)

Sumber : Pemerintah Desa Masaloka Selatan, 2023

Berdasarkan hasil wawancara dan data sekunder berupa tabel LRA Desa, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa operator Desa Masaloka Selatan paham dan mampu mengoperasikan *website* Siskeudes tidak hanya penatausahaan keuangan desa namun juga pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan melalui *website* Siskeudes yang tercermin dari baiknya kualitas laporan keuangan Desa Masaloka Selatan.

3.2. Tepat Sasaran

Pelaksanaan seluruh kegiatan pengelolaan keuangan desa termasuk kegiatan penatausahaan keuangan desa ini harus didasarkan pada peraturan yang berlaku sebagai dasar hukum yang sah dalam kegiatan penatausahaan keuangan desa. Berdasarkan wawancara dengan kepala desa Ibu Masfiah tanggal 11 Januari 2023, beliau mengatakan bahwa: “Pedoman yang digunakan dalam kegiatan penatausahaan keuangan desa di Desa Masaloka Selatan tentunya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan berpedoman pula pada peraturan bupati bombana yang mengatur pengelolaan keuangan desa termasuk kegiatan penatausahaan keuangan desa tersebut. Untuk itu tentu pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan perundangan yang berlaku karena namanya kegiatan pemerintahan tentu dituntut harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang sah”.

Berikut penulis lampirkan data sekunder berupa tabel prosedur penatausahaan keuangan desa berdasarkan peraturan bupati nomor 60 tahun 2018 untuk memperkuat hasil wawancara di atas.

Tabel 3.3
Tahapan Penatausahaan Keuangan Desa

No	Tahapan	Pelaksana
(1)	(2)	(3)
1.	Kegiatan penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan di tutup setiap akhir bulan.	Kaur Keuangan
2.	Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar.	Kaur Keuangan
3.	Penerimaan Desa di setor ke rekening kas desa dengan cara disetor langsung, di setor mealalui bank lain atau disetor oleh kaur keuangan untuk penerimaan yang di terima pihak ketiga.	Kaur Keuangan
4.	Pengeluaran beban APBDes berdasarkan RAKDes dengan persetujuan kepala desa. a. Pengeluaran dengan swakelola dikeluarkan kaur keuangan kepada kaur/kasi pelaksana kegiatan atas dasar DPA dengan SPP disetujui kepala desa. b. Pengeluaran dengan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan kaur keuangan langsung dan diketahui kepala desa.	Kaur Keuangan

	<p>c. Pengeluaran untuk belanja pegawai dilakukan langsung oleh kaur keuangan dan diketahui kepala desa.</p> <p>d. Semua pengeluaran dibuktikan dengan kwitansi penerimaan dan pengeluaran dan ditandatangani oleh kaur keuangan/ penerima dana</p>	
5.	Buku kas umum dan buku pembantu ditutup setiap akhir bulan dan dilaporkan kaur keuangan kepada sekretaris desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	Kaur Keuangan
6.	Sekretaris desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan buku kas umum dan buku pembantu dari kaur keuangan.	Sekretaris Desa
7.	Sekretaris desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis tersebut kepala kepala desa untuk disetujui.	Sekretaris Desa

Sumber : Peraturan Bupati Bombana nomor 60 Tahun 2018, 2023

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh kepala desa bahwa pelaksanaan penatausahaan keuangan desa telah berdasarkan pedoman pengelolaan keuangan desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 dan turunannya berupa peraturan daerah yang mengatur pengelolaan keuangan desa yaitu Peraturan Bupati Bombana nomor 60 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.

3.3. Tepat Waktu

a. Ketepatan waktu pencatatan saat terjadi transaksi

Pada kesempatan wawancara sekretaris desa pada tanggal 12 Januari 2023, Pak Musrin mengatakan bahwa: “Kegiatan pencatatan atas transaksi tetap saya lakukan secara manual di buku kas umum, sementara itu penatausahaan melalui *website* Siskeudes dilakukan oleh pak Damrin selaku operator Siskeudes. Hal ini dikarenakan berbagai keterbatasan Desa Masaloka Selatan yang baru mendapat akses Jaringan internet pada bulan Agustus tahun 2022 dan kualitas jaringan internet yang terbatas, apalagi tahun 2023 pelaksanaan Siskeudes harus dilakukan penuh secara *online* sehingga apabila kegiatan Penatausahaan dilakukan di Desa Masaloka Selatan akan menghambat pelaksanaan penatausahaan tersebut.”

Kegiatan observasi yang penulis lakukan pada situasi kondisi Desa Masaloka Selatan yang mana penulis selama penelitian tinggal di Desa Masaloka Selatan dengan kondisi jaringan internet memang sangat buruk sehingga hal yang wajar jika sulit untuk mengakses *website* Siskeudes berbasis *online* dari Desa Masaloka Selatan. Meskipun kendala jaringan menjadi kendala pada pencatatan transaksi melalui Siskeudes namun kegiatan penatausahaan tetap berlangsung dan dilakukan di Kasiputih oleh Pak Damrin selaku operator *website* Siskeudes.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas, maka diketahui bahwa indikator pertama yaitu waktu pencatatan penatausahaan yang dilakukan dengan waktu transaksi yang sebenarnya walaupun kondisi jaringan kurang mendukung. Hal ini dikarenakan pelaksanaan penatausahaan melalui *website* Siskeudes dilakukan oleh pak Damrin di Kasiputih (salah satu daerah di Ibukota Kabupaten Bombana) dan dilakukan ketika kegiatan pembangunan ataupun kegiatan yang dilaksanakan oleh kepala urusan atau kepala seksi tersebut akan dilaksanakan sehingga SPP pelaksanaan kegiatan juga dapat dibuat. Kemudian Pencatatan atas transaksi yang terjadi juga dilakukan pencatatan penatausahaan keuangan secara manual penatausahaan keuangan desa di Desa Masaloka Selatan dilakukan dua kali pencatatan.

b. Penyampaian BKU dan buku pembantu tepat waktu

Penyampaian BKU dan buku pembantu sangat tergantung pada kegiatan penatausahaan yang dapat berjalan tepat waktu sehingga penyampaian BKU dapat dilaksanakan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Berikut hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Masfiah terkait hal ini:

“Seperti yang saya sampaikan sebelumnya karena pencatatan transaksi dan kegiatan penatausahaannya itu sudah tepat waktu jadi penyampaian BKU setiap bulan itu tepat waktu juga, sekretaris selalu menyampaikan verifikasi laporan penatausahaan keuangan desa atas kegiatan di desa setiap bulannya. Untuk alur penyampaian BKU dan Buku Pembantu umumnya Bendahara bertugas mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran anggaran atas kegiatan yang terjadi di BKU dan Buku Pembantu yang nanti setiap akhir bulan harus di tutup dan di sampaikan kepada sekretaris desa untuk diverifikasi selambat lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya, baru kemudian saya selaku kepala desa menandatangani BKU dan Buku Pembantu tersebut”.

Melalui kegiatan observasi lapangan memang penulis menemukan fakta bahwa Ibu Dini merangkap jabatan sebagai seorang guru sekaligus kepala urusan keuangan Desa Masaloka Selatan. Hal ini wajar terjadi di desa karena seperti yang diketahui desa memiliki banyak keterbatasan tenaga perangkat desa sehingga memanfaatkan tenaga PNS untuk mengurus suatu urusan di desa. Terlebih kegiatan di desa terbatas sehingga dirasa tidak membebani perangkat desa pada kegiatan pembangunan yang mana pengawasannya juga telah dibantu oleh penasehat desa yang dikirimkan langsung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Pemerintah Kabupaten Bombana.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi serta diperkuat dengan data sekunder berupa Penyampaian BKU dan Buku Pembantu oleh Sekretaris Desa Masaloka Selatan, maka diketahui bahwa indikator penyampaian BKU dan buku pembantu tepat waktu dapat tercapai meskipun terkendala pada kelemahan jaringan di Desa Masaloka Selatan namun pencatatan dilakukan dengan cara manual dan juga pengimputan penatausahaan keuangan desa melalui *website* Siskeudes sehingga menjadi lebih terukur dan lebih mudah oleh karenanya penyampaian buku kas umum desa (BKU) dan buku pembantu dalam berjalan tepat waktu dan langsung dapat dicetak melalui *website* Siskeudes.

3.4. Tercapainya Tujuan

Indikator tercapainya tujuan dalam kegiatan penatausahaan keuangan desa adalah mempermudah pelaksanaan penatausahaan keuangan desa sehingga dapat mewujudkan asas akuntabilitas dan asas transparansi karena menggunakan sistem aplikasi melalui *website* Siskeudes. Hal ini akan mewujudkan pengelolaan keuangan yang bebas dari tindakan penyelewangan oleh oknum-oknum perangkat desa yang tidak bertanggung jawab.

Asas akuntabilitas pada laporan keuangan Desa Masaloka Selatan dapat ditunjukkan pada kegiatan audit laporan keuangan yang dilakukan oleh inspektorat dimana hasil audit laporan keuangan Desa Masaloka Selatan tersebut tidak terdapat temuan, sehingga dapat disimpulkan asas akuntabilitas dapat tercapai. Kemudian pada kegiatan observasi penulis lakukan pada tanggal 10 Januari 2023 dapat menggambarkan partisipatif masyarakat yaitu masyarakat ikut langsung dalam rapat penentuan BLT dan pembangunan rabat beton penghambat ombak pada musim angin barat. Pada rapat tersebut terlihat seluruh masyarakat desa berpartisipasi dalam penentuan penerima BLT tahun 2023 dan masyarakat bebas menyampaikan pendapatnya terkait pembangunan rabat beton penghalang ombak. Maka penulis menyimpulkan bahwa kegiatan penatausahaan keuangan desa menggunakan Siskeudes mampu memenuhi indikator tercapainya tujuan yang memudahkan kegiatan penatausahaan karena penggunaan Siskeudes yang tersistem menyebabkan asas pengelolaan keuangan yang akuntabilitas, transparan, dan partisipatif yang dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran.

3.5. Perubahan Nyata

Perubahan yang nyata dalam kegiatan penatausahaan keuangan desa adalah penggunaan sistem baru dalam penatausahaan keuangan desa memiliki perubahan yang signifikan dan perubahan yang nyata dirasakan oleh aparat pemerintah desa. Hal ini penting untuk melihat apakah penggunaan sistem aplikasi melalui *website* Siskeudes dalam kegiatan penatausahaan keuangan desa dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Efektif dari segi waktu penginputan kegiatan penatausahaan dan efektif dari segi hasil pelaksanaan kegiatan penatausahaan keuangan desa.

Wawancara bersama sekretaris desa pada tanggal 12 Januari 2023 terkait perubahan nyata setelah penggunaan *website* Siskeudes untuk kegiatan penatausahaan keuangan desa sebagai berikut: “iya untuk aspek efisien karena memang pak damrin yang menginput semua kegiatan penatausahaan keuangan desa jauh lebih efisien karena setelah habis bulan pelaksanaan pelaporan keuangan tinggal dibikin dari rekapan penatausahaan setiap pelaksanaan kegiatan sehingga sangat memudahkan, untuk efisiensi karena kendala jaringan jadi cukup menjadi hambatan untuk efektivitas penatausahaan. Disisi lain setiap kegiatan oleh kaur dan kasi harus di-SPP-kan terlebih dahulu di *website* Siskeudes, sedangkan untuk beberapa kaur dan kasi memiliki kompetensi yang kurang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga saya dan kepala desa harus mengambil alih pekerjaannya, ya hal ini wajar karena memang di desa ini memiliki banyak keterbatasan sehingga kami perangkat desa yang memahami hal tersebut dapat memakluminya”.

Maka penulis simpulkan bahwa perubahan yang nyata dalam kegiatan penatausahaan keuangan desa menggunakan *website* Siskeudes sangat dirasakan oleh perangkat desa yaitu Sekretaris desa yang sebelumnya melakukan penatausahaan secara manual beralih menggunakan aplikasi *website* Siskeudes. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan keuangan desa lebih efektif karena dalam prosesnya lebih terpadu dan tersistem setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Pertanggungjawaban SPJ juga lebih mudah karena sebelumnya bendahara telah menginput SPP kegiatan yaitu panjar kegiatan, SPP definitif, dan SPP pembayaran. Namun untuk aspek efisien belum dapat dikatakan efisien karena harus dilakukan penatausahaan dua kali yaitu dengan manual dan juga harus di-*input* melalui *website* Siskeudes karena pada dasarnya penggunaan teknologi informasi diharapkan mengurangi beban pekerjaan perangkat desa namun realitanya disamping penggunaan *website* Siskeudes harus dilakukan juga penatausahaan secara manual akibat kelemahan jaringan internet di Desa Masaloka Selatan.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian yang penulis lakukan dengan menganalisis laporan keuangan berupa Laporan Realisasi APBDes Desa Masaloka Selatan, maka penulis menemukan fakta bahwa APBDes tahun 2022 dapat terealisasi sebesar 100%. Berikut realisasi APBDes tahun 2022

Tabel 4. 1
Laporan APBDes Desa Masaloka Selatan Tahun Anggaran 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2	Pendapatan Transfer	1.465.004.000,00	
	4.3	Pendapatan Lain-Lain	150.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.465.154.000,00	
1	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAHAN	379.831.000,00	
		DESA		
1.1		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan Dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% Untuk Kegiatan)	368.131.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Kunjungan Kepala Desa	48.000.000,00	DD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	48.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa	221.400.000,00	DD
1.1.02	5.2.	Belanja Pegawai	221.400.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa	14.924.988,00	DD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	14.924.988,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (TK, Honor, PKPKD Dan PPKD, Perlengkapan, Perkantoran Dan Pakaian)	17.472.792,00	DD,DL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.472.792,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	63.000.000,00	DD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	63.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (Rapat, TK, Makan Minum, Perlengkapan, Perkantoran, Pakaian Seragam, per)	2.255.000,00	DD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.255.000,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial Anggota BPD	878.220,00	DD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	878.220,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	11.700.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan PB Desa (Reguler)	2.375.000,00	DD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.375.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug Desa Non Reguler)	1.625.000,00	DD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.625.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa dll)	4.665.000,00	DD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.665.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (PB Desa, PB Desa Perubahan, LPJ dll)	3.035.000,00	DD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.035.000,00	

1956
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
2		BIDANG PELAKSANA PEMBANGUNAN DESA	324.594.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	20.300.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian, dll)	15.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Beprestasi	4.700.000,00	DD
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	78.699.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, insentif, KB, Dsb)	21.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	29.200.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.200.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	7.400.000,00	DD, DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	
2.2.08		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BLB)	2.400.000,00	DD
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.2.07		Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	12.000.000,00	DDS
2.2.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasana/ Posyandu/ Polindes/ PKD**	6.699.000,00	DD
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	6.699.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	80.782.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	25.000.000,00	DD
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.4.91		Bantuan Pembangunan Jamban Keluarga	55.782.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.782.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	142.813.000,00	
2.5.91		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasana Pelestarian Lingkungan Hidup	142.813.000,00	DDS
2.5.91	5.3.	Belanja Modal	142.813.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.000.000,00	
2.6.98		Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Desa Berbasis Online	2.000.000,00	DDS
2.6.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	79.120.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.600.000,00	
3.1.01		Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	3.600.000,00	DD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	44.150.000,00	
3.2.93		Operasional Kegiatan Hari-Hari Besar Keagamaan dan Nasional	20.150.000,00	DD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.200.000,00	
3.2.93	5.3.	Belanja Modal	3.950.000,00	
3.2.95		Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	24.000.000,00	DD
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	31.370.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD	13.200.000,00	DD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	14.420.000,00	DD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.420.000,00	
3.4.91		Operasional Dasa Wisma	3.750.000,00	DD
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	215.509.000,00	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	215.509.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/ dll)	198.505.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	198.505.000,00	
4.1.91		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Tambatan Perahu Milik Desa	17.004.000,00	DDS
4.1.91	5.3.	Belanja Modal	17.004.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK	466.100.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	77.300.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	77.300.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	77.300.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	388.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	388.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	388.800.000,00	
JUMLAH BELANJA			1.465.154.000,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			0,00	
SISA LEBIH PEMBIYAAAN ANGGARAN			0,00	

Sumber : Pemerintah Desa Masaloka Selatan, 2023

Meskipun realisasi APBDes tahun 2022 sebesar 100% namun melalui hasil wawancara bersama perangkat desa Masaloka Selatan menemukan fakta bahwa dana desa tahun anggaran 2022 kurang lebih sebesar 900 juta rupiah menjelang akhir tahun baru terserap sekitar 700 juta. Sehingga pada kegiatan evaluasi pengelolaan keuangan desa, pemerintah kabupaten menyarankan untuk membelanjakan sisa dana desa untuk kebutuhan ketahanan pangan. Namun karena sebagian besar penduduk Desa Masaloka Selatan memiliki mata pencaharian sebagai seorang nelayan maka perangkat desa sepakat untuk dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat di bidang kelautan. Sehingga realisasi APBDes Desa Masaloka Selatan dapat direalisasikan 100%. Hal ini berdampak pada pengurangan jumlah Dana Desa yang diterima oleh Desa Masaloka Selatan pada tahun anggaran 2023 yaitu hanya dialokasikan kurang lebih sebesar 700 juta.

Meskipun demikian hasil realisasi APBDes Desa Masaloka Selatan tersebut dapat menggambarkan bahwa penatausahaan keuangan desa di Desa Masaloka Selatan sudah baik, hasil bertolak belakang dengan hasil yang di peroleh pada penelitian Nailatil Ilmi Nafi'ah (2019) yang menyimpulkan bahwa penerapan Siskeudes pada proses penatausahaan pengeluaran keuangan desa yang belum mencapai target secara maksimal sehingga dikategorikan belum efektif. Hasil ini juga berbeda pada hasil penelitian Geri Rivaldi (2018) yang menyimpulkan bahwa penatausahaan keuangan desa di Desa Tenjolat belum efektif karena berbagai fasilitas yang kurang mendukung kegiatan penatausahaan keuangan desa tersebut.

Hasil penelitian Irma Mulyadi (2019) sejalan dengan hasil yang saya dapatkan yaitu memiliki serapan anggaran realisasi anggaran mencapai 100% dan menunjukkan pencapaian yang tinggi pada tahun anggaran 2017. Terakhir pada hasil penelitian Desi Amarana (2022) yang mengatakan bahwa Desa Perapat Hilir baru menggunakan Siskeudes tahun 2018 dan tahun 2019 baru menggunakan Siskeudes secara keseluruhan sehingga sistem penatausahaan yang dilakukan dapat

dikatakan baik dan sesuai dengan standar yang ada, hal ini juga terjadi pada Desa Masaloka Selatan dimana tahun 2019 sudah di tuntut untuk melaksanakan kegiatan Penatausahaan Keuangan Desa menggunakan Siskeudes secara online dan berpedoman pada standar operasional pengelolaan keuangan desa khususnya kegiatan penatausahaan keuangan desa.

3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumenasi maka penulis menemukan fakta dilakapangan bahwa Desa Masaloka Selatan terkendala pada jaringan internet yang lemah, meskipun jaringan dan listrik sudah menjangkau dan masuk di desa Masaloka Selatan pada bulan Oktober tahun 2020 namun kekuatan jaringan dalam mengakses internet tidak stabil yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan pengelolaan keuangan desa termasuk kegiatan penatausahaan keuangan desa. Pelaksanaan penatausahaan keuangan desa sejak tahun 2016-2022 dilakukan secara *online* dalam *website* Siskeudes sehingga kualitas jaringan untuk mengakses internet menjadi kendala yang menjadi faktor penghambat kegiatan penatausahaan keuangan desa. Hal ini menyebabkan adanya ketergantungan dalam pengoperasian kegiatan penatausahaan keuangan berbasis sistem informasi melalui *website* Siskeudes karena kendala jaringan internet sehingga harus dilaksanakan di Ibukota Kabupaten Bombana.

Kemudian sumber daya perangkat di Desa Masaloka Selatan yang kurang memahami tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan tugas pemerintahan desa khususnya kepala urusan dan kepala seksi. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa keterbatasan sumber daya manusia di desa dan tingkat pendidikan perangkat Desa Masaloka Selatan yang rata-rata memiliki jenjang pendidikan terakhir SMA mempengaruhi pemahaman perangkat desa khususnya para kepala seksi terhadap tugas-tugas dan fungsinya sebagai seorang kepala seksi. Hal ini turut menjadi faktor kendala dalam pengelolaan keuangan desa dan penatausahaan keuangan desa, apalagi kepala urusan dan kepala seksi berperan sebagai pelaksana kegiatan yang menjadi penyebab utama terjadinya transaksi keuangan desa dan sebagai pelaksana kegiatan harus menginput SPP kegiatan yang akan dilakukan Sehingga secara tidak langsung membebani kerja kepala desa dan sekretaris desa karena harus mengambil alih tugas-tugas yang ada.

IV. KESIMPULAN

Penulis menarik kesimpulan bahwa kegiatan penatausahaan keuangan desa di Desa Masaloka Selatan sudah efektif dimana dari 5 (lima) dimensi yang menentukan ukuran keefektifan dalam kegiatan penatausahaan keuangan desa terdapat satu dimensi dan indikator yang belum tercapai. Indikator tersebut berupa efisiensi pelaksanaan penatausahaan keuangan desa di Desa Masaloka Selatan. Beberapa kendala dihadapi oleh perangkat Desa Masaloka Selatan dan mempengaruhi keefektifan kegiatan penatusahaan keuangan desa yaitu kelemahan jaringan internet untuk mengakses *website* Siskeudes dan kelemahan perangkat desa khususnya kepala seksi yang kurang memahami tugas pokok dan fungsinya sehingga membebani sekretaris desa. Upaya yang telah dimaksimalkan oleh perangkat Desa Masaloka Selatan agar menyelesaikan kendala yang dihadapi yaitu pengadaan orbit untuk menunjang akses internet dan kekuatan jaringan internet, ikut berperan aktif dalam kegiatan pelatihan dan pembinaan tugas pokok dan fungsi perangkat desa yang diadakan oleh pemerintah kabupaten. Serta menganggarkan gaji untuk operator khusus pelaksanaan pengelolaan keuangan melalui *website* Siskeudes.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu desa saja sebagai objek penelitian karena lebih berfokus

pada masalah dan hambatan yang dirasakan di Desa Masaloka Selatan Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki banyak keterbatasan dalam menjawab permasalahan yang ada di desa Masaloka Selatan Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya. Penentuan lokasi juga hanya berorientasi pada permasalahan yang dialami di satu desa dalam kecamatan yang sama oleh karena itu, penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada desa yang berbeda di lokasi kecamatan yang sama untuk mendapatkan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus kepada perangkat Desa Masaloka Selatan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Secara khusus penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Desa Masaloka Selatan Ibu Marfiah yang telah berbesar hati untuk menerima penulis untuk melaksanakan penelitian di Desa Masaloka Selatan sekaligus memberikan bekal pengalaman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang diadakan selama kegiatan penelitian. Serta penulis ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah mendukung dan membantu agar penelitian ini dapat berjalan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Soemantri, B. T. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Bandung : Fokusmedia.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- , 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sutrisno, E. 2007. *Budaya Organisasi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Wasistiono, S., & Tahir, I. 2006. *Prospek Pengembangan Desa* (B. Durachman (ed.); I). Bandung : CV. Fokusmedia-Anggota IKAPI.
- Aramana, D. 2022. "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara". *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol.7.
- Lestyowati, J. 2019. "Implementasi Penatausahaan Keuangan Desa di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Akuntabilitas". *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Vol.1.
- Midra, T., Agustar, A., & Syarfi, I. W. 2021. "Tata Kelola Nagari dan Implikasinya terhadap Pembangunan Bagari di Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok". *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, Vol.11.
- Mulyadi, I. 2019. "Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Pemerintahan Desa di Kota Sawahlunto". *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol.9.
- Nafi'ah, N. I. 2019. "Efektivitas Penerapan Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Meningkatkan Kualitas Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Desa di Desa Kalirejo Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur". *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.5.

Rivaldi, G. 2018. *"Efektivitas Penatausahaan Keuangan Desa di Desa Tenjolat Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat"*. In *Jurnal Administrasi Publik*.

Sagitarini, Y. A., Mukoffi, A., Wikardojo, S., & Himawan, S. 2022. *"Efektivitas Pengelolaan Dana Desaa Ditinjau dari Kualitas Pelaporan Keuangan Desa di Desa Sumbersekar"*. *Jurnal Magister Akuntansi Trisaksi*, Vol.9.

<https://sid.kemendes.go.id>. *Informasi Dana Desa di Desa Masaloka Selatan Tahun 2021*. Rabu, 12 Oktober 2022

<https://www.terkinonesia.com/2021/08/30/pembangunan-infrastruktur-di-desa-masaloka-selatan-mengalami-kemajuan-yang-signifikan/>. *Pembangunan Infrastruktur di Desa Masaloka Selatan Mengalami Kemajuan yang Signifikan*. Jum'at, 03 November 2022.

<https://www.bpkp.go.id/berita/komitmen-implemetasikan-siskeudes2.0/> *Komitmen Kabupaten Se-Sultra Implementasikan Siskeudes 2.0*. Senin, 09 Januari 2023.

